

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG TIM
BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diperlukannya penambahan anggota Tim Beracara, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Beracara Dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tim Beracara Dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tim Beracara Dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN
MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Dr. Salusra Widya, MA NIP. 19610509 198812 1 001	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

2.	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
3.	Dr. Robin Asad Suryo, M.A NIP. 19650809 199003 1 001	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan
4.	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
5.	Iwan Herniwan, S.Si., MP. NIP. 19691106 199803 1 006	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
6.	R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM. NIP. 19660529 199201 1 001	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. NIP. 19640323 199203 1 005	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak., MM.	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Setya Budi Arijanta, S.H., KN. NIP. 19701231 199503 1 001	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

10.	Andi Susanto, S.STP., M.Sc. NIP. 19790513 199711 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
11.	Rinaldi Morintosh, S.H., M.Kn NIP. 19810509 201012 1 001	Kepala Subbagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
12.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001	Kepala Seksi Kontrak Payung	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
13.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001	Kepala Seksi Evaluasi Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
14.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001	Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
15.	Ichwan Fajar Harika, S.H. NIP. 19830310 201402 1 001	Calon Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
16.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangghah Wilayah I
17.	Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. NIP. 19840208 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
18.	Ardian Hoppin Sitompul, S.H. NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

19.	Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn NIP. 19880709 201502 2 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
20.	Benny Leopold Dumais, S.H. NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
21.	Muhammad Hanif Firnanda, S.H. NIP. 19940703 201801 1 003	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
22.	Syukri, S.H. NIP. 19921124 201801 1 001	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
23.	Asih Riska Nurmasari, S.H. NIP. 19940725 201902 2 005	Calon Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
24.	Cherish Shery Desarya, S.H., M.H. NIP. 19881220 201902 2 002	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
25.	Mahatmya Widyasari, S.H.	Staf Bagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
26.	Faraditha Utami Putri Sihite, S.H	Staf Perencanaan Pengadaan K/L/I	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
27.	Rayhan Maulana, S.H.	Staf Perencanaan Pengadaan K/L/I	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

28.	Zainal Abidin, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
29.	Siti Fathia Rizki Sarkuti, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
30.	Afif Pramayuda, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
31.	Niko Muhamad Insani, S.H.	Staf Wilayah Maluku dan Papua	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
32.	Didi Nahtadi, S.Sy.	Staf Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
33.	Pascalis Jiwandono, S.H.	Staf Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 18 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.